

**PENERAPAN *E-GOVERNMENT* UNTUK PENCEGAHAN *STUNTING*
MELALUI PELAYANAN APLIKASI LANTINGKUU BATOLA
DI KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Rifat Dwiki Haiqal

NPP. 33.0789

Program Studi

Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: rifatdh10@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Asri B., S.Sos., M.Si

Email: asribugis165@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: The implementation of e-government through the Lantingkuu Batola application service has become an important instrument in efforts to prevent stunting through digital means. However, data indicates that stunting rates in Barito Kuala Regency have actually increased from 15.9% to 16.5% in 2024, despite the Lantingkuu Batola application having been operational since November 2023. This condition reveals a gap between the goals of digitalizing health services and actual achievements in the field. ***Purpose:*** This study aims to describe why the implementation of e-government through the Lantingkuu Batola application has not been optimal and what efforts the local government has made to address it. ***Method:*** The method used is descriptive qualitative, with data collected through interviews, observation, and documentation, and analysis conducted using the E-Government Implementation Success Elements theory from the Harvard JFK School as presented in Indrajit (2016), which encompasses three dimensions: support, capacity, and value. ***Result:*** The findings indicate that the absence of specific regulations governing the Lantingkuu Batola application has resulted in fluctuating budget constraints, network infrastructure gaps, and the burden of double reporting becoming the primary inhibiting factors for the performance of posyandu cadres using the application. ***Conclusion:*** The implementation of e-government through the Lantingkuu Batola application has not been optimal due to the lack of specific regulations, fluctuating budgets, and the burden of double reporting. Various strategic government efforts through regulation and human resource strengthening are still in their early stages and have therefore not yet produced a significant impact.

Keywords: E-Government, Lantingkuu Batola, Public Services, Stunting

ABSTRAK

Permasalahan: Penerapan *e-government* melalui pelayanan aplikasi Lantingkuu Batola, menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan *stunting* berbasis digital. Namun data menunjukkan angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala justru meningkat dari 15,9%, menjadi 16,5% pada tahun 2024 meskipun aplikasi Lantingkuu Batola telah beroperasi sejak November 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan digitalisasi layanan kesehatan dengan capaian nyata di lapangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengapa penerapan *e-government* melalui aplikasi Lantingkuu Batola belum optimal dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasinya. **Metode:** Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis menggunakan teori Elemen Sukses Penerapan *E-Government* dari *Harvard JFK School* dalam karya Indrajit (2016) yang mencakup tiga dimensi yaitu *support*, *capacity*, dan *value*. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan belum tersedianya regulasi khusus berkaitan aplikasi Lantingkuu Batola, akibatnya keterbatasan anggaran yang fluktuatif, kesenjangan infrastruktur jaringan, dan beban pelaporan ganda menjadi faktor penghambat utama kinerja para kader posyandu pengguna aplikasi. **Kesimpulan:** Penerapan *e-government* melalui aplikasi Lantingkuu Batola belum optimal akibat ketiadaan regulasi khusus, anggaran fluktuatif, dan beban pelaporan ganda. Berbagai upaya strategis pemerintah melalui regulasi dan penguatan SDM masih tahap awal sehingga belum berdampak signifikan.

Kata kunci: *E-Government*, Lantingkuu Batola, Pelayanan Publik, *Stunting*.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam penanganan *stunting* yang menjadi prioritas nasional. Seperti halnya sebuah kapal yang berisi mesin penggerak, menggambarkan sistem hukum dan konstitusi negara yang menjadi sumber energi penggerak Asri B. (2025:120). Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi, termasuk informasi tentang gizi dan kesehatan ibu serta anak. Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan meluncurkan kebijakan *e-government* melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini bertujuan mendorong transformasi digital birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Karena peran pemerintah lebih sebagai pelayan masyarakat (*customer driven government*) yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau profit, sehingga haruslah “*meeting needs of the customer, not the bureaucracy*” Labolo (2014:40). Lebih lanjut, Presiden juga menargetkan penurunan angka *stunting* nasional menjadi 14,2 persen pada tahun 2029, yang diperkuat oleh program makan bergizi gratis sebagai strategi nasional peningkatan gizi masyarakat.

Pencegahan *stunting* secara substantif harus dilakukan sejak dini, yakni dimulai dari masa kehamilan ibu hingga anak berusia dua tahun atau yang dikenal sebagai periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Sukmawati dkk (2025). Pada masa kehamilan, upaya pencegahan difokuskan pada pemenuhan gizi ibu hamil, pemeriksaan kehamilan secara rutin (*antenatal care*), serta pemberian suplemen zat besi dan asam folat. Setelah bayi lahir, pencegahan *stunting* dilanjutkan melalui

pemberian ASI eksklusif selama enam bulan, dilanjutkan dengan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi seimbang, pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala di posyandu, pemberian imunisasi dasar lengkap, serta perbaikan sanitasi dan perilaku hidup bersih di lingkungan keluarga.

Penerapan transformasi digital secara global telah membawa perubahan mendasar dalam cara pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik, sehingga mendorong adopsi model *e-government* sebagai upaya mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan Julio & Fahlevvi (2025). Kabupaten Barito Kuala di Provinsi Kalimantan Selatan merespons kebijakan tersebut dengan meluncurkan aplikasi Lantingkuu Batola pada 2 November 2023. Adopsi teknologi digital oleh institusi pemerintahan sebagai Langkah dalam mekanisme birokrasi modern inilah yang kemudian disebut *Electronic Government* atau (*e-government*) Indrayani dkk (2025). Aplikasi yang merupakan akronim dari "Lanjut Atasi *Stunting* ke Arah Maju untuk Barito Kuala" ini diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai instrumen *e-government* untuk mendukung pencegahan *stunting*. Fitur utama aplikasi meliputi layanan posyandu, pendataan Kader Pembangunan Manusia (KPM), informasi berbasis desa, koordinasi lintas kecamatan dan perangkat daerah, hingga akses langsung bagi eksekutif dan masyarakat. Dengan wilayah yang luas dan heterogen, pemerintah daerah meyakini bahwa digitalisasi layanan akan mempercepat deteksi dan intervensi kasus *stunting* secara lebih tepat sasaran sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) Deng dkk (2021). Landasan hukum penerapan aplikasi ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE serta Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pencegahan *Stunting*.

Data yang ada menunjukkan fenomena yang kontradiktif dan mengkhawatirkan. Meskipun aplikasi Lantingkuu Batola telah beroperasi hampir dua tahun dan digunakan oleh 389 posyandu serta mencakup 201 desa di seluruh Kabupaten Barito Kuala, prevalensi *stunting* justru meningkat dari 15,9 persen pada tahun 2023 menjadi 16,5 persen pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 0,6 persen dalam kurun waktu satu tahun ini terjadi di saat yang bersamaan dengan operasional penuh aplikasi yang seharusnya menjadi solusi digital untuk memonitor dan mengintervensi kasus *stunting* secara lebih efektif. Lebih ironis lagi, di Play Store aplikasi ini hanya diunduh lebih dari seratus kali tanpa ada satu pun ulasan atau rating dari pengguna, yang mengindikasikan rendahnya tingkat interaksi dan umpan balik masyarakat terhadap layanan digital yang disediakan pemerintah.

Kesenjangan yang lebih tajam terungkap ketika peneliti melakukan observasi awal di lapangan. Para kader posyandu sebagai ujung tombak penginput data mengeluhkan berbagai kendala teknis, seperti sering terjadinya *system error* pada fitur tertentu, proses input data yang lambat, serta ketidakpuasan terhadap prosedur pelaporan yang justru dirasakan berbelit. Beberapa kader bahkan mengaku bahwa mereka harus melakukan pelaporan dua kali, pertama ke aplikasi milik Kementerian Kesehatan yang sudah ada sebelumnya, dan kedua ke aplikasi Lantingkuu Batola. Beban administratif ganda ini tentu bertentangan dengan tujuan awal digitalisasi, yaitu menciptakan efisiensi dan penyederhanaan alur kerja. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang sangat lebar antara tujuan ideal penerapan *e-government* (menekan angka *stunting* melalui layanan digital yang efisien) dengan realitas di lapangan (*stunting* justru naik, aplikasi tidak diminati, dan kader terbebani). Kesenjangan inilah yang menjadi *research gap* utama yang mendorong peneliti untuk mengkaji secara mendalam mengapa hal ini bisa terjadi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Secara teoretis, penelitian tentang penerapan *e-government* untuk pencegahan *stunting* masih tergolong langka dan belum banyak mendapat perhatian dari akademisi di bidang ilmu pemerintahan. Karena penerapan adalah tindakan mempraktikkan suatu metode, teori atau elemen lainnya untuk menghasilkan tujuan spesifik serta memenuhi keperluan yang diinginkan oleh individu, kelompok, atau golongan yang sudah direncanakan dan disusun dengan baik Flechsigg dkk (2022). Berdasarkan analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap publikasi ilmiah dari database *Google Scholar*, terlihat bahwa kluster penelitian *e-government system* terpisah secara signifikan dari kluster *stunting prevention*. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa meskipun kedua topik telah banyak diteliti secara terpisah, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka analisis masih sangat terbatas. Padahal, pemanfaatan teknologi digital untuk mengatasi masalah gizi kronis pada balita merupakan kebutuhan mendesak di era transformasi digital pemerintahan saat ini.

Lebih lanjut, penelitian yang menggunakan teori Elemen Sukses Penerapan *E-Government* dari Harvard JFK School dalam karya Indrajit (2016) untuk menganalisis aplikasi pencegahan *stunting* di tingkat kabupaten juga belum pernah dilakukan sebelumnya. Teori ini selama ini lebih banyak diterapkan pada konteks *e-government* di sektor administrasi kependudukan, perizinan, atau pelayanan sosial, belum pada sektor kesehatan yang memiliki karakteristik berbeda seperti keterlibatan relawan (kader posyandu) dan tantangan geografis yang kompleks. Karena pada dasarnya pelayanan publik adalah bentuk penyelenggaraan kegiatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat luas Ojasalo dkk (2024). Dengan demikian, terdapat *knowledge gap* yang jelas belum ada penelitian yang secara sistematis menguji apakah elemen *support*, *capacity*, dan *value* dari teori Indrajit dapat menjelaskan keberhasilan atau kegagalan penerapan *e-government* di bidang pencegahan *stunting*. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut sekaligus menguji relevansi teori tersebut dalam konteks yang baru.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai penerapan *e-government* melalui aplikasi Lantingkuu Batola sebagai dasar evaluasi dan perumusan strategi perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami akar permasalahan aplikasi sehingga perumusan solusi berisiko tidak tepat sasaran. Akibatnya, upaya pencegahan *stunting* berbasis digital dapat terus berjalan tanpa perbaikan yang berarti, sementara angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala berpotensi terus meningkat.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari tujuh penelitian terdahulu yang relevan. Prasetyo dkk (2023) mengkaji kerangka manajemen konvergensi *stunting* berbasis integrasi sistem regional menggunakan metode kuantitatif deskriptif di lima provinsi Kalimantan, hasilnya menegaskan bahwa tata kelola data terintegrasi dan komitmen pimpinan daerah adalah kunci percepatan penurunan *stunting*. Kasim dkk (2025) meneliti efektivitas aplikasi SIGA BKKBN di Provinsi Gorontalo dengan metode kualitatif,

menemukan aplikasi masih perlu optimalisasi karena keterbatasan fitur komunikasi interaktif. Andriyus dkk (2023) mengkaji aplikasi Sitanjak Makin Mantap Dinas Sosial Kota Pekanbaru menggunakan metode kualitatif fenomenologi berbasis teori Indrajit (2016), menemukan penerapan belum optimal akibat SDM IT terbatas, anggaran minim, dan sosialisasi kurang. Oriza dkk (2022) meneliti aplikasi SITEPAK Dinas Dukcapil Kabupaten Bekasi dengan teori Wirtz dan Daiser (2015), menemukan kendala migrasi database dan gangguan website namun lebih efektif dari pelayanan manual. Anryana dkk (2024) mengkaji aplikasi IKD Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa Barat berbasis teori Indrajit (2016), menemukan ketiga elemen terpenuhi dengan dukungan komitmen pimpinan dan pelatihan SDM. Yulistivira dkk (2023) meneliti aplikasi "Ayo Ceting" di Puskesmas Andalas Kota Padang untuk pencegahan *stunting*, menemukan inovasi belum optimal akibat sosialisasi kurang, dana terbatas, dan kendala teknis. Nurjanah dkk (2024) mengkaji implementasi kebijakan *stunting* di Kabupaten Garut berbasis teori Van Meter dan Van Horn, menemukan implementasi belum optimal akibat kurangnya SDM dan koordinasi lintas sektor.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga hal utama yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini tidak hanya mengukur efektivitas teknis aplikasi atau tingkat kepatuhan pengguna, tetapi secara kritis mengungkap adanya dikotomi manfaat antara pemerintah sebagai penyelenggara dan kader posyandu sebagai pengguna. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah merasakan kemudahan integrasi data dan pemantauan *real-time*, para kader justru mengalami beban pelaporan ganda yang kontraproduktif. Hal ini belum pernah diungkap dalam studi-studi sebelumnya yang cenderung melihat manfaat *e-government* secara monolitik.

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan refocusing anggaran yang sering diberlakukan di daerah akibat tekanan fiskal memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberlanjutan pengembangan aplikasi *e-government*. Fenomena ini jarang dibahas dalam literatur *e-government* yang lebih banyak berfokus pada aspek teknis atau kelembagaan. Penelitian ini membuktikan bahwa fluktuasi anggaran akibat kebijakan makro fiskal dapat menghancurkan rencana pengembangan yang telah disusun sejak awal tahun, sehingga aplikasi hanya mampu bertahan pada taraf operasional minimum tanpa pernah bisa berkembang.

Ketiga, penelitian ini secara empiris menguji dan memperkaya teori Elemen Sukses Penerapan *E-Government* dari Harvard JFK School dalam karya Indrajit (2016) dengan mengajukan dua proposisi baru. Proposisi pertama adalah bahwa elemen *value* perlu dipecah menjadi *value for institution* dan *value for user* karena keduanya tidak selalu sejalan. Proposisi kedua adalah bahwa elemen *support* perlu mempertimbangkan variabel kontinuitas kepemimpinan dan perlindungan anggaran dari refocusing sebagai faktor kritis yang sebelumnya tidak disebut dalam teori asli. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mereplikasi teori yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi berupa modifikasi dan perluasan teori yang dapat digunakan untuk menganalisis penerapan *e-government* di daerah dengan karakteristik fiskal yang dinamis.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa penerapan *e-government* melalui aplikasi Lantingkuu Batola belum mencapai tingkat optimal sehingga angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala justru meningkat, dengan mengidentifikasi hambatan pada elemen *support*, *capacity*, dan *value* berdasarkan teori Indrajit (2016). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menerapkan *e-government* untuk mendukung pencegahan kenaikan *stunting* melalui layanan aplikasi Lantingkuu Batola. Hasil penelitian diharapkan berkontribusi secara teoretis bagi pengembangan *e-government* sekaligus memberikan masukan praktis untuk meningkatkan efektivitas aplikasi Lantingkuu Batola.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan *e-government* melalui aplikasi Lantingkuu Batola berlangsung di lapangan, termasuk hambatan, kondisi nyata, dan persepsi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat Sugiyono (2023:18). Pendekatan kualitatif dinilai paling tepat karena mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara angka, melainkan perlu digali melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi Creswell & Creswell (2023).

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *judgment sampling*, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, peran, dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian Mulyadi (2020:87). Informan dipilih dari berbagai level agar data yang diperoleh komprehensif dan representatif. Informan berjumlah 6 orang, terdiri dari: (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala (Bapak Aris Saputera) sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan kebijakan tertinggi, (2) Kepala Bidang Layanan *E-Government* (Bapak Akhmadi) sebagai pengelola utama aplikasi, (3) Pengelola Layanan Operasional Bidang Layanan *E-Government* (Bapak Noor Asy'arry Muslim), (4) Admin Operator Aplikasi Lantingkuu Batola (Bapak Noor Rahmat Effendy), serta (5) Ibu Samsiah dan (6) Ibu Siti Rahmah sebagai kader posyandu pengguna langsung aplikasi di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur karena wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dalam Nurdin & Hartati (2019:178). Selain itu observasi dan studi dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman). Penelitian dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dan Puskesmas Marabahan serta Puskesmas Bantuil, Provinsi Kalimantan Selatan, selama Januari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *e-government* melalui aplikasi Lantingkuu Batola dianalisis menggunakan tiga elemen sukses dari teori Harvard JFK School dalam Indrajit (2016), yaitu dukungan (*support*), kapasitas

(*capacity*), dan manfaat (*value*). Ketiga elemen ini saling terkait dan bersama-sama menentukan apakah suatu inisiatif digitalisasi layanan publik dapat berhasil atau justru gagal mencapai tujuannya. Berikut adalah pemaparan masing-masing dimensi berdasarkan temuan lapangan.

3.1. Penerapan *E-Government* Untuk Pencegahan *Stunting* Melalui Pelayanan Aplikasi Lantingkuu Batola di Kabupaten Barito Kuala

3.1.1. Elemen Support (Pendukung)

1. *E-Government* sebagai *Political Will* Pemerintah Daerah

Komitmen pemerintah daerah terhadap penerapan *e-government* diwujudkan secara formal melalui RPJMD yang mencantumkan pengembangan *e-government* pada Misi ke-4, yaitu "Membangun kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital". Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, Bapak Aris Saputera, dalam wawancara pada 13 Januari 2026, menyampaikan:

Kalau melihat pengembangan *e-government* di RPJMD Kabupaten Barito Kuala, di sana jelas disebutkan pada misi kabupaten Barito Kuala yaitu membangun kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Sehingga aplikasi Lantingkuu Batola masuk sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan misi tersebut. Jadi bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sudah terkoneksi dengan arah pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa aplikasi Lantingkuu Batola merupakan bagian integral dari arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Kepala Bidang Layanan *E-Government*, Bapak Akhmadi, dalam wawancara pada 12 Januari 2026, menambahkan bahwa komitmen pimpinan daerah, termasuk Bupati, diwujudkan melalui kebijakan, penganggaran, serta penetapan program prioritas di bidang *e-government*. Temuan ini sejalan dengan pandangan Indrajit (2016) bahwa *political will* dari pimpinan tertinggi merupakan elemen paling krusial dalam mendorong transformasi digital pemerintahan.

Peneliti berpandangan bahwa pengembangan *e-government* telah memiliki landasan yang kuat dalam dokumen perencanaan strategis daerah yaitu RPJMD Kabupaten Barito Kuala. Hal ini menunjukkan adanya *political will* yang jelas dari pemerintah daerah sehingga transformasi digital telah terintegrasi dalam visi, misi, serta program prioritas pembangunan daerah. Keberadaan aplikasi Lantingkuu Batola merupakan bagian dari implementasi nyata arah kebijakan *e-government* yang terencana dan didukung secara kelembagaan.

2. Komitmen dan Kebijakan Penyediaan Sumber Daya

Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya untuk mendukung implementasi aplikasi Lantingkuu Batola di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala terlihat dari upaya pengalokasian anggaran, penyediaan infrastruktur teknologi, serta penempatan sumber daya manusia yang mendukung operasional sistem. Selain itu, adanya penugasan khusus kepada pengelola layanan operasional dan admin aplikasi menunjukkan bahwa pengelolaan Lantingkuu Batola dilakukan secara terstruktur dan menjadi bagian dari prioritas kerja organisasi.

Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya tercermin melalui pengalokasian anggaran APBD, penyediaan infrastruktur teknologi (server, jaringan, perangkat pendukung), dan penugasan SDM untuk operasional sistem. Kepala Dinas menyampaikan bahwa komitmen penyediaan sumber daya sudah cukup terlihat, namun mengalami pasang surut seiring pergantian kepemimpinan Bupati. Regulasi yang menjadi landasan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang SPBE, yang diturunkan dalam Renstra Diskominfo. Namun regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur pengelolaan Aplikasi Lantingkuu Batola.

3. Kebijakan atau Aturan yang Mengatur Implementasi *E-Government*

Temuan kritis dalam penelitian ini adalah belum tersedianya regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan dan pengembangan aplikasi Lantingkuu Batola. Aplikasi ini lahir sebagai replikasi dari inovasi Kabupaten Sumedang melalui keputusan Sekretaris Daerah, namun tanpa disertai regulasi teknis yang mengikat. Kepala Bidang Layanan *E-Government*, Bapak Akhmadi, menyampaikan "Kendala utama dalam proses penerapan aplikasi Lantingkuu Batola bersumber dari belum adanya kebijakan khusus yang mengaturnya, yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak Diskominfo dalam melakukan pengembangan dan optimalisasi aplikasi".

Hasil observasi di Diskominfo mengkonfirmasi bahwa pelaksanaannya hanya berlandaskan Perda No. 2 Tahun 2020 tentang SPBE yang bersifat umum, bahwa regulasi atau kebijakan yang mengatur penerapan aplikasi Lantingkuu Batola untuk pencegahan *stunting* di Kabupaten Barito Kuala masih belum memiliki dasar hukum yang kuat. Kondisi ini terlihat dari ketiadaan peraturan bupati maupun peraturan daerah yang secara khusus mengatur aplikasi tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kendala akibat tidak adanya regulasi tersebut.

4. Kemampuan Organisasi dalam Sosialisasi

Keberhasilan sebuah sistem dalam suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknisnya semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan dan memperkenalkan sistem tersebut kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Hal ini berlaku pula dalam konteks penguatan *e-government* di Kabupaten Barito Kuala melalui aplikasi Lantingkuu Batola, di mana peran organisasi menjadi sangat vital untuk menghadirkan layanan pencegahan *stunting* yang berkualitas melalui pemanfaatan aplikasi sebagai sarana pengelolaan data laporan *stunting*.

Berdasarkan dokumentasi sosialisasi, dapat dipahami bahwa sosialisasi merupakan aspek penting yang menentukan efektivitas penerapan suatu sistem digital di suatu organisasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan sosialisasi aplikasi Lantingkuu Batola melalui berbagai pendekatan, antara lain pertemuan massal dengan seluruh kader posyandu se-Kabupaten Barito Kuala di puskesmas, bimbingan teknis kepada operator lapangan, serta pemanfaatan media sosial dan website resmi pemerintah daerah.

Namun pelaksanaannya menghadapi kendala yang kompleks. Kepala Dinas menyatakan "Kendala dalam sosialisasi cukup beragam, jangkauan wilayah yang luas, dengan sebagian daerah terpencil yang terpisah oleh sungai, menyebabkan tidak semua desa dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi. Di sisi lain, tingkat literasi digital masyarakat yang bervariasi juga menjadi tantangan

tersendiri, di mana kader posyandu di perkotaan cenderung lebih mudah menerima teknologi dibandingkan yang berada di pedesaan.” Keterbatasan jumlah SDM yang melakukan sosialisasi dan belum meratanya pemahaman operator di lapangan turut menjadi kendala. Temuan ini konsisten dengan penelitian Andriyus dkk. (2023) yang menemukan sosialisasi sebagai aspek paling krusial namun paling rentan dalam implementasi *e-government* di daerah.

3.1.2. Elemen Capacity (Kapasitas)

1. Ketersediaan Sumber Daya Finansial

Ketersediaan anggaran finansial memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penerapan aplikasi sebagai upaya pencegahan *stunting*. Pendanaan yang mencukupi akan memungkinkan proses pengembangan, pemeliharaan, dan sosialisasi aplikasi berjalan dengan optimal. Sebaliknya, keterbatasan dana berpotensi memicu kegagalan dalam implementasi aplikasi dan menghambat tercapainya harapan pengguna. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan yang cermat dan terencana menjadi hal yang mutlak diperlukan demi memastikan keberlangsungan dan keandalan aplikasi dalam upaya penanggulangan *stunting*.

Berdasarkan data anggaran pada renstra diskominfo, dipahami bahwa ketersediaan anggaran yang memadai menjadi prasyarat penting bagi keberlangsungan pengembangan aplikasi *e-government*. Berdasarkan hasil penelitian, anggaran yang dialokasikan melalui APBD untuk program Pengelolaan Aplikasi Informatika dinilai sudah cukup untuk menjaga operasional dan pemeliharaan sistem, namun belum mampu mengakomodasi kebutuhan pengembangan lebih lanjut seperti penambahan fitur baru, perluasan jangkauan, dan peningkatan kapasitas server.

Kondisi ini diperparah oleh kebijakan refocusing anggaran yang beberapa kali diberlakukan, sehingga alokasi yang telah direncanakan sejak awal tahun terpaksa dipangkas akibat adanya kebutuhan mendesak di sektor lain. Kepala Dinas menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran bukan hanya pernah terjadi sekali, melainkan berulang kali, dan yang paling dirasakan adalah saat kebijakan refocusing menyebabkan sejumlah kegiatan pengembangan harus ditunda bahkan dibatalkan. Tren penurunan anggaran ini dikonfirmasi oleh dokumen Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala yang menunjukkan penyusutan anggaran secara signifikan dari tahun pertama hingga akhir periode perencanaan.

2. Ketersediaan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan elemen krusial yang mendukung berjalannya aplikasi Lantingkuu Batola di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala. Infrastruktur yang dimaksud mencakup berbagai perangkat fisik seperti server, serta jaringan internet yang digunakan untuk mengakses dan mengoperasikan sistem aplikasi tersebut. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 1.**Jumlah Fasilitas Infrastruktur Pendukung Teknologi Informasi**

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1.	Ruangan	
	Ruangan Server	1
	Ruangan <i>Network Operation Center</i> (NOC)	1
2.	Komputer	
	a. Komputer PC	22
	b. Laptop	12
	c. Notebook	15
	d. Printer	24
	e. Scanner	2
3.	Hardware	
	a. access point	57
	b. Router	29
	c. Switch/switch HUB	11
	d. Network tool kit	51
	e. server	5
	f. CCTV	4
4.	Videotron	1

Sumber : Diolah oleh Peneliti dari Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala, 2026

Berdasarkan tabel 3.1. diatas diskominfo Kabupaten Barito Kuala telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang meliputi kantor, server, komputer, jaringan internet, serta perangkat keras dan lunak pendukung lainnya. Dari sisi internal dinas, infrastruktur yang tersedia dinilai cukup untuk menunjang operasional aplikasi. Namun tantangan utama justru muncul di sisi eksternal, yaitu keterbatasan jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala, terutama di desa-desa yang terpencil.

Ketidakterataan infrastruktur ini secara langsung memengaruhi kemampuan kader posyandu dalam mengakses dan menggunakan aplikasi Lantingkuu Batola di lapangan. Beberapa kader melaporkan bahwa jaringan internet yang kerap terganggu di berbagai posyandu menjadi penghambat proses input data secara real-time. Kondisi ini mencerminkan tantangan infrastruktur digital yang bersifat penting dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih sistematis dari pemerintah daerah.

3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor kunci yang menentukan sukses atau tidaknya penerapan aplikasi Lantingkuu Batola dalam mendukung *e-government*, khususnya pada layanan pelaporan pencegahan *stunting*. SDM yang terampil dan berkualitas mampu merancang, membangun, serta mengoperasikan aplikasi dengan baik. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi *e-government* tidak semata-mata ditentukan oleh keunggulan teknologi yang digunakan, melainkan juga sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan SDM yang bertanggung jawab mengelolanya. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel berikut :

Tabel 3. 2.

Komposisi Pegawai per Bidang Lingkup di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala

No	Unit Kerja	PNS	PPPK	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	6	1	7
3.	Bidang Layanan <i>E-Government</i>	4	9	13
4.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5	-	5
5.	Bidang Statistik dan Persandian	2	1	3
Jumlah		18	11	29

Sumber : Diolah oleh Peneliti dari Renstra Diskominfo Kabupaten Barito Kuala, 2026

Berdasarkan tabel 3.2. data komposisi pegawai Diskominfo Kabupaten Barito Kuala yang diperoleh dari Renstra tahun 2026, total pegawai berjumlah 29 orang dengan rincian: Kepala Dinas 1 orang, Sekretariat 7 orang, Bidang Layanan *E-Government* 13 orang, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 5 orang, serta Bidang Statistik dan Persandian 3 orang. Bidang Layanan *E-Government* sebagai pengelola utama aplikasi Lantingkuu Batola memiliki jumlah pegawai terbanyak, namun kedua pimpinan dinas secara konsisten mengakui bahwa jumlah tersebut masih berada pada batas kecukupan minimal.

Sisi kompetensi, pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aplikasi secara umum sudah memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta rutin diikutsertakan dalam bimbingan teknis dari Kementerian Kominfo. Namun kebutuhan peningkatan penguasaan teknologi terbaru masih menjadi catatan penting, mengingat perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat sementara pelatihan yang tersedia bersifat periodik dan belum selalu mengimbangi kebutuhan lapangan.

3.5.1. Elemen Value (Manfaat)

1. Manfaat bagi Pemerintah

Penerapan aplikasi Lantingkuu Batola memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah, terutama dalam hal integrasi dan sentralisasi data *stunting*. Sebelum kehadiran aplikasi ini, data *stunting* terfragmentasi di berbagai OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BKKBN, dan kecamatan masing-masing. Dengan aplikasi ini, seluruh data kini terpusat dalam satu platform digital yang dapat dipantau secara real-time, sehingga sebaran kasus *stunting* per kecamatan bahkan per desa dapat dimonitor langsung oleh pemerintah dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data.

Kepala Bidang Layanan *E-Government* menyampaikan bahwa aplikasi ini dirancang dengan pendekatan value creation, bukan sekadar pemenuhan kewajiban digitalisasi, melainkan sebagai respons terhadap permasalahan nyata di lapangan yaitu tingginya angka *stunting* di Kabupaten Barito Kuala. Temuan ini selaras dengan penelitian Prasetyo dkk. (2023) yang menegaskan bahwa tata kelola data *stunting* yang terintegrasi merupakan kunci strategis dalam percepatan penurunan angka *stunting* di tingkat daerah.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Dari sisi pengguna di lapangan, aplikasi Lantingkuu Batola memberikan kemudahan bagi kader posyandu dalam proses pencatatan dan pelaporan data kesehatan balita dan ibu hamil secara digital,

menggantikan proses manual yang sebelumnya memerlukan pengisian puluhan formulir kertas setiap bulan. Secara teknis, seluruh proses tersebut kini dapat diselesaikan melalui smartphone di tempat pelayanan, yang secara signifikan meringankan beban administratif kader posyandu sebagai mitra strategis pemerintah di tingkat komunitas.

Namun terdapat kesenjangan yang cukup mencolok antara persepsi penyelenggara dengan pengalaman nyata pengguna di lapangan. Dua kader posyandu yang diwawancarai mengungkapkan bahwa manfaat aplikasi belum sepenuhnya optimal. Salah satu kader menyampaikan bahwa meskipun sudah hampir setahun lebih menggunakan aplikasi, kebingungan dalam pengoperasiannya masih kerap dialami, terutama bagi kader yang berusia lanjut. Lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa kader posyandu diwajibkan melakukan pelaporan data secara ganda pertama ke aplikasi Lantingkuu Batola, kemudian ke aplikasi pelaporan dari Kemenkes yang sudah ada sebelumnya sehingga kehadiran aplikasi ini justru menambah beban kerja alih-alih mengurangnya. Kondisi ini mengindikasikan perlunya integrasi teknis antara aplikasi Lantingkuu Batola dengan sistem pelaporan nasional yang sudah berjalan.

3.5.2. Upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Dalam Menerapkan *E-Government* Untuk Mendukung Pencegahan Kenaikan *Stunting* Melalui Pelayanan Aplikasi Lantingkuu Batola

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menempuh tiga upaya strategis, yaitu mendorong penyusunan regulasi daerah khusus yang mengatur operasionalisasi aplikasi, memperbaiki strategi sosialisasi melalui bimbingan teknis interaktif dan *manual book* yang telah disusun sebagai panduan resmi pengguna, serta memperkuat SDM melalui penambahan formasi dan program magang mahasiswa teknologi informasi. Namun upaya regulasi dan penguatan SDM masih dalam tahap awal perencanaan sehingga dampaknya belum signifikan.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa penerapan *e-government* melalui aplikasi Lantingkuu Batola belum optimal. Sama halnya dengan temuan Prasetyo dkk. (2023) dan Oriza dkk. (2022), penelitian ini mengkonfirmasi bahwa implementasi *e-government* di daerah selalu dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran, SDM, dan regulasi yang belum memadai. Sama halnya pula dengan temuan Yulistivira dkk. (2023), inovasi aplikasi di bidang pencegahan *stunting* menghadapi hambatan sosialisasi dan kendala teknis yang serupa meskipun berada di wilayah berbeda.

Berbeda dengan temuan Anryana dkk. (2024) yang menemukan ketiga elemen Indrajit terpenuhi secara memadai, penelitian ini menemukan ketiga elemen belum terpenuhi secara optimal khususnya pada aspek regulasi dan beban pelaporan ganda yang bersifat unik dan tidak ditemukan pada penelitian sebelumnya. Temuan ini menolak asumsi bahwa ketersediaan aplikasi secara teknis secara otomatis menghasilkan manfaat optimal, karena penelitian ini membuktikan bahwa kesiapan ekosistem hukum, infrastruktur, dan literasi digital pengguna sama pentingnya. Hal ini memperkuat temuan Kasim dkk. (2025) bahwa aplikasi berbasis pemerintah memerlukan kerangka regulasi dan komunikasi interaktif yang kuat agar efektif.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Terdapat sejumlah temuan menarik yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, aplikasi Lantingkuu Batola merupakan replikasi dari aplikasi Kabupaten Sumedang, namun replikasi ini dilakukan tanpa disertai penyesuaian regulasi khusus untuk konteks Kabupaten Barito Kuala sebuah kelemahan mendasar yang tidak ditemukan di daerah asal aplikasi. Kedua, kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang sebagian wilayahnya terpisah, menciptakan tantangan sosialisasi yang bersifat unik dan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan konvensional. Ketiga, pemerintah telah menginisiasi tiga upaya strategis, mendorong penyusunan Perda/Perbup khusus yang mengatur operasionalisasi aplikasi mencakup SOP, kewenangan, integrasi data, dan perlindungan data, merancang bimbingan teknis interaktif berbasis nyata disertai penyusunan manual book resmi, serta membangun kemitraan dengan perguruan tinggi melalui program magang mahasiswa IT selama enam bulan. Namun seluruh upaya tersebut masih dalam tahap awal perencanaan sehingga dampaknya belum signifikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-government* untuk pencegahan *stunting* melalui aplikasi Lantingkuu Batola di Kabupaten Barito Kuala belum optimal karena tiga faktor yang saling terkait. Pertama, dari sisi dukungan (*support*), tidak adanya regulasi khusus yang mengatur aplikasi m-enyebabkan ketidakpastian hukum, fluktuasi anggaran akibat kebijakan *refocusing*, serta sosialisasi yang belum merata terutama di wilayah terpencil. Kedua, dari sisi kapasitas (*capacity*), keterbatasan anggaran untuk pengembangan, ketimpangan infrastruktur jaringan internet antara perkotaan dan pedesaan, serta jumlah sumber daya manusia teknis yang tidak memadai menjadi hambatan struktural yang sulit diatasi dalam jangka pendek. Ketiga, dari sisi manfaat (*value*), terjadi dikotomi persepsi antara pemerintah yang merasakan kemudahan integrasi data dengan kader posyandu yang justru terbebani oleh kewajiban pelaporan ganda ke sistem Kementerian Kesehatan.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi tiga strategi utama, yaitu mendorong penyusunan regulasi khusus, memperbaiki strategi sosialisasi melalui bimtek interaktif dan penyediaan *manual book*, serta memperkuat kapasitas SDM melalui penambahan formasi dan program magang mahasiswa IT. Namun, semua upaya tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka *stunting* maupun peningkatan kualitas layanan dari perspektif pengguna. Penelitian ini juga menemukan bahwa teori Elemen Sukses Penerapan *E-Government* dari Indrajit (2016) perlu diperkaya dengan dua proposisi baru, yaitu bahwa elemen *value* bersifat dikotomis antara institusi dan pengguna, serta bahwa kontinuitas kepemimpinan dan perlindungan anggaran dari kebijakan *refocusing* merupakan variabel penting dalam elemen *support*.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek waktu dan biaya, yang membatasi cakupan pengumpulan data terhadap pelaksanaan Penerapan *E-Government* Untuk Pencegahan *Stunting* Melalui Pelayanan Aplikasi Lantingkuu Batola. Kondisi ini mengakibatkan analisis hanya dapat dilakukan pada skala terbatas, sehingga belum mampu merepresentasikan seluruh dinamika dan tantangan penerapan aplikasi tersebut.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penerapan *E-Government* Untuk Pencegahan *Stunting* Melalui Pelayanan Aplikasi Lantingkuu Batola untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andriyus, Rusadi, S., & Monalisa. (2023). Penerapan E-Government Melalui Aplikasi ‘Sitanjak Makin Mantap’ Oleh Dinas Sosial. *Jurnal Governansi*, 9(2), 95–102. <https://doi.org/10.30997/jgs.v9i2.7219>
- Asri, B., 2025. Pengantar ilmu pemerintahan: Sejarah, konsep, teori dan studi kasus. Penerbit Adab. <https://adabstore.co.id/pengantar-ilmu-pemerintahan-sejarah-konsep-teori-dan-studi-kasus-2/>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D., 2023. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://books.google.co.id/books?id=335ZDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Deng, T., Zhang, K., & Shen, Z. M. (2021). Journal of Management Science and Engineering A systematic review of a digital twin city : A new pattern of urban governance toward smart cities. *Journal of Management Science and Engineering*, 6(2), 125–134. <https://doi.org/10.1016/j.jmse.2021.03.003>
- Flehsig, C., Anslinger, F., & Lasch, R. (2022). Journal of Purchasing and Supply Management Robotic Process Automation in purchasing and supply management : A multiple case study on potentials , barriers , and implementation. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 28(1), 100718. <https://doi.org/10.1016/j.pursup.2021.100718>
- Indrayani, E., Roselin, R., Nainggolan, E., Daud, S., Regency, M., Civil, R., Agency, S., Sulawesi, S., Muna, R., Kebangsaan, U., Author, C., & Online, A. (2025). Analyzing The Successful Implementation of General Procurement Information System (Sirup) Using The Delone and Mclean Model in Muna Regency , Southeast Sulawesi. 7(2), 153–180. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i2.5745>
- Julio, E., Matutina, B., Fahlevvi, M. R., & Harapan, S. (2025). Kesenjangan Generasi dan Geografis dalam Literasi Digital : Implikasinya terhadap Kebijakan E-Government di Kabupaten. 7(2), 201–216. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i2.5771>
- Labolo, M., 2014. Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya (Edisi revisi, cetakan ke-7). PT RajaGrafindo Persada. https://books.google.co.id/books?id=EOveEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
- Mulyadi, M., 2020. Riset Kualitatif: Memahami Proses Penelitian Kualitatif. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. https://www.researchgate.net/publication/370561417_Metodologi_Penelitian_Kualitatif.
- Nurdin, I., & Hartati, S., 2019. Metodologi penelitian sosial. Penerbit Media Sahabat Cendekia.

<https://books.google.co.id/books?id=tretDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

- Nurjanah, N., Nasution, B., Wahidar, T. I., & Putri, W. E. (2024). Efektivitas Komunikasi Inovasi Aplikasi E-HDW dalam Meningkatkan Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Riset Komunikasi*, 7(2), 307–321. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v7i2.1061>
- Ojasalo, J., Kauppinen, S., & Ojasalo, J. (2024). Public Value in Public Service Ecosystems Public Value in Public Service Ecosystems. *Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing*, 36(2), 179–207. <https://doi.org/10.1080/10495142.2022.2133063>
- Oriza, N., Kusumadewi, R., & Abdal. (2022). Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Layanan SITEPAK Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. *Jurnal Dialektika*, 20(3), 64–72. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v20i3.104>
- Prasetyo, A., Noviana, N., Rosdiana, W., Anwar, M. A., Hartiningsih, Hendrixon, Harwijayanti, B. P., & Fahlevi, M. (2023). Stunting Convergence Management Framework through System Integration Based on Regional Service Governance. *Sustainability (Switzerland)*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/su15031821>
- S, A., Yamin, A., & Fietroh, M. N. (2024). Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 188–193. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3619>
- Sugiyono., 2023. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2, Cetakan ke-5)*. Alfabeta. <https://online.fliphtml5.com/cyqfr/jppo/#p=12>.
- Sukmawati, S., Hermayanti, Y., Fadlyana, E., Maulana, I., & Mediani, H. S. (2025). Health cadres' experiences in detecting and preventing childhood stunting in Indonesia: a qualitative study. *BMC Public Health*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-025-24192-z>
- Yulistivira, A., Ariany, R., & Putera, R. E. (2023). Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Mobile Cegah Stunting (Ayo Ceting) di Puskesmas Andalas Kota Padang. *Jurnal Publik*, 17(01), 16–28. <https://doi.org/10.52434/jp.v17i01.181>
- Zhafirah Nuralifya Rilani Kasim, Yanti Aneta, & Sri Yulianty Mozin. (2025). Penerapan E-Government melalui Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) di BKKBN Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 633–640. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5161>